

MODAL SOSIAL MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKOWISATA DI HUTAN LINDUNG

Importance Of Community's Social Capital On Ecotourism Development In Protection Forest

Christine Wulandari

Program Studi Magister Ilmu Kehutanan, Universitas Lampung
Jl. S. Brojonegoro 1, Bandar Lampung 35145

ABSTRACT. *Ecotourism is one of the major forms of tourism in terms of its natural beauty, education, and supports the development of the community's institution. This program is suitable to be developed in protected forests because it can increase community income due to the prohibition of logging in utilizing the forest products. The ecotourism program will be well developed if there is good collaboration between its management members based on their social capital. This research was conducted in April-May 2018 in protected forests at the "Pinus Ecopark" ecotourism location, Lampung due to the lack of social capital research in development of ecotourism in protected forests. The research objective is to analyzed the social capital of the community who manage ecotourism in protected forests. The social capital of members of "Pinus Ecopark" management unit is an intermediary and has bridging interrelations, therefore easy to increase the level of social capital in supporting the development of these ecotourism site.*

Keywords: *ecotourism, social capital, bridging interrelation*

ABSTRAK. Ekowisata adalah salah satu bentuk pariwisata yang dominan kaidah keindahan alamnya, mempunyai unsur pendidikan, dan mendukung pengembangan kelembagaan masyarakatnya. Dengan demikian program ini cocok untuk dikembangkan di hutan lindung karena dapat menambah pendapatan masyarakat akibat adanya larangan penebangan dalam memanfaatkan hasilnya. Program ekowisata akan bisa berkembang dengan baik jika ada kerjasama yang baik antar anggota pengurusnya berdasarkan modal sosial yang dimiliki. Penelitian ini dilakukan pada bulan April-Mei 2018 di hutan lindung tepatnya di lokasi ekowisata Pinus Ecopark, Provinsi Lampung karena masih minimnya penelitian modal sosial dalam pengembangan ekowisata terutama di hutan lindung. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis modal sosial masyarakat yang mengelola ekowisata di hutan lindung. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tingkatan modal sosial para pengurus Pinus Ecopark adalah sedang dan dominasi interelasinya bersifat *bridging* sehingga mudah untuk dapat dikembangkan level modal sosialnya dalam mendukung pengembangan lokasi ekowisata tersebut.

Kata kunci: ekowisata, modal sosial, interelasi *bridging*

Penulis untuk korespondensi, surel : christine.wulandari@fp.unila.ac.id dan chs.wulandari@gmail.com

PENDAHULUAN

Di sekitar lokasi ekowisata yang dekat dengan hutan hampir semuanya ada pemukiman yang otomatis tentu ada kehidupan sosial masyarakatnya. Keberadaan mereka bisa jadi sebuah modal tersendiri dalam meningkatkan pemanfaatan potensi ekowisata dan memperoleh dampak ekonomi yang positif. Adanya modal pengembangan ekowisata yang berasal dari interaksi anggota

masyarakatnya biasa disebut dengan modal sosial. Adapun ciri-ciri modal sosial (Poli, 2007), yaitu: a. Dapat digunakan dalam mencapai tujuan bersama, b. Dimiliki secara bersama, c. Dapat bertambah atau berkurang, d. Makin tidak dibagi-bagi akan jadi semakin berkurang, dan e. Makin dibagi-bagi akan jadi semakin bertambah. Beberapa manfaat modal sosial yang dimiliki masyarakat (Kasih, 2007), yaitu: a. Modal sosial akan dapat timbulkan rasa saling percaya dalam mewujudkan kepentingan bersama, b. Modal sosial akan memungkinkan masyarakat dapat

memecahkan masalah secara bersama dan lebih mudah, dan c. Modal sosial akan bisa menciptakan jaringan kerja supaya lebih mudah dalam mendapatkan suatu informasi. Artinya, modal sosial diperlukan dalam pengembangan ekowisata di suatu wilayah.

Dalam Deklarasi Quebec 2002 dikatakan bahwa keberhasilan suatu pengembangan ekowisata melalui pembangunan modal sosial ditentukan oleh peran dan tanggungjawab masyarakat di wilayah tersebut (UNEP dan WTO, 2002). Pentingnya modal sosial untuk mendukung keberhasilan pengembangan ekowisata karena upaya ini memerlukan keseimbangan antara aspek sosial budaya, ekonomi dan lingkungan (Goeldner *et al.* 2000; Milic *et al.* 2008). Menurut Winarni (2011), modal sosial adalah karakteristik suatu lembaga atau organisasi sosial termasuk masyarakatnya yang mengkoordinasikan dan memfasilitasi adanya kerja sama dalam mencapai suatu tujuan dan keuntungan bersama organisasi tersebut. Poli (2007) ungkapkan bahwa modal sosial dapat mempersatukan masyarakat dalam kesatuan kehidupan yang beradab. Senada yang yang dikatakan Kasih (2007) bahwa modal sosial adalah norma yang munculnya secara informal namun merupakan dasar dalam melakukan suatu kerjasama antar individu maupun kelompok. Di Pulau Samui, Thailand pernyataan tersebut terbukti bahwa komponen modal sosial berdampak positif dalam pengembangan ekowisata. Hal ini terjadi karena dengan adanya partisipasi masyarakat lokal yang memiliki rasa (*sense of belonging*) yang kuat terhadap kampung halaman mereka. Dampak positif lainnya yaitu saling menghormati satu sama lain sehingga mereka dapat bekerja sama dalam mengembangkan pariwisata lokal di pulau tersebut. Penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Syahriar dan Darwanto (2015) bahwa modal sosial berperan terhadap pengembangan wisata di Obyek Wisata Colo. Tradisi lokal yang dimiliki ternyata bisa meningkatkan rasa saling percaya masyarakat dan kemudian dapat menjadi dasar dalam pembentukan kelembagaan lokal. Adanya modal sosial yang baik dapat mendukung adanya perubahan tanggungjawab individu ke kelompok karena keeratn anggota kelompok meningkat (Yustika, 2010).

Berdasarkan tiga hasil penelitian sebelumnya tersebut maka dapat dikatakan

bahwa pengembangan ekowisata harus didukung oleh masyarakat dan tidak hanya didukung oleh potensi sumberdaya alam. Hasil penelitian Rahmayulis (2008), modal sosial dalam pengembangan ekowisata di Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK) adalah kepercayaan masyarakat adat terhadap pimpinan adat, sesama anggota komunitas, dan norma adat yang merupakan landasan mereka dalam berkehidupan sosial. Rachmawati (2010) menyatakan bahwa dalam pengembangan ekowisata di Kawasan Gunung Salak harus mempertimbangkan unsur-unsur modal sosial terutama status dan peran, kepercayaan antar individu, norma, kekuasaan dan kewenangan, serta sanksi sosial. Lebih lanjut (Hasbullah, 2006) menyatakan bahwa modal sosial lebih menekankan pada potensi kelompok dan pola-pola hubungan antar individu dalam suatu kelompok maupun antar kelompok.

Pada umumnya penelitian modal sosial dikaitkan dengan pengembangan suatu program termasuk program kehutanan misal program hutan kemasyarakatan (HKM) di hutan lindung. Zhao *et al.* (2011) mendukung hal tersebut dan menyatakan bahwa konsep modal sosial masih minim dipakai dalam penelitian-penelitian pariwisata. Selama ini penelitian tentang modal sosial di hutan lindung belum banyak yang mengaitkannya dengan pengembangan ekowisata. Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/2016 tentang Perhutanan Sosial disebutkan bahwa potensi ekowisata di hutan lindung adalah program yang disarankan untuk dikembangkan. Pada hutan lindung tidak boleh ada penebangan sehingga pengembangan ekowisata dapat jadi alternatif pendapatan bagi masyarakat. Berdasarkan kondisi ini maka penelitian modal sosial ini dilakukan dalam pengembangan ekowisata di hutan lindung yang luasnya 317.615 hektar dari total luas hutan 1.004.735 hektar (Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, 2018). Instansi kehutanan ini juga menyatakan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 256/Kpts/II/2000 diketahui hutan lindung di Kabupaten Lampung Barat menduduki 80% dari 362.811 hektar total luas hutan (diluar Cagar Alam Laut seluas 77.281 hektar).

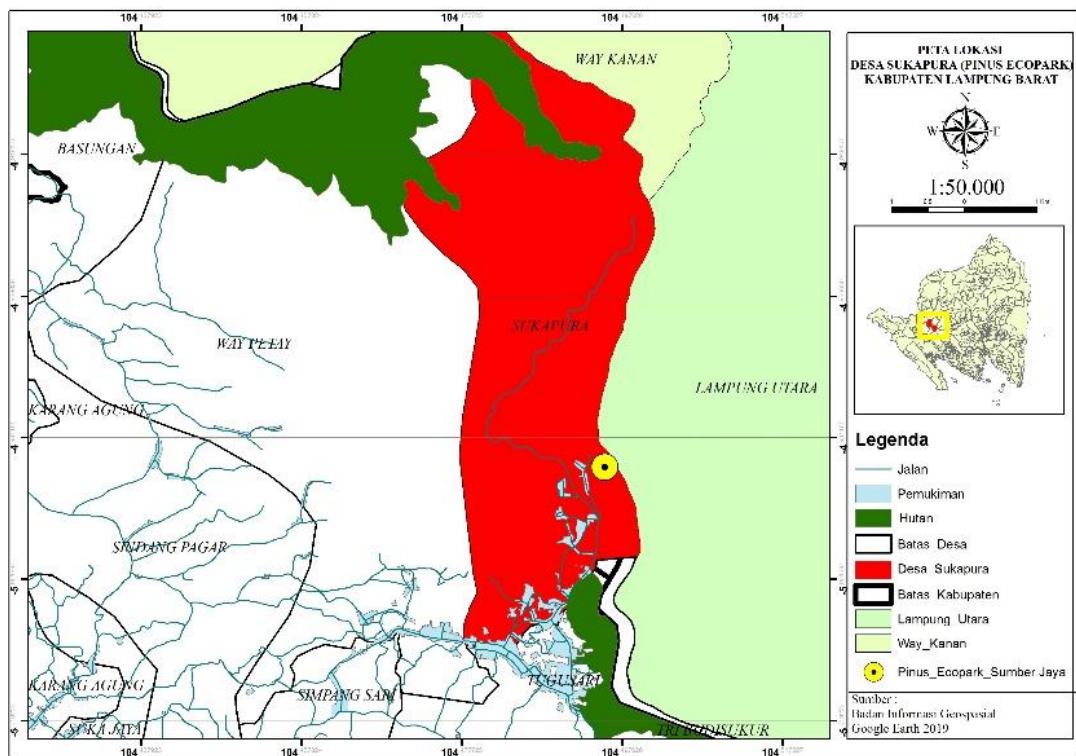
Selain itu, ekowisata sebagai salah satu dari pengembangan pariwisata mempunyai

potensi untuk dikembangkan di tingkat nasional maupun global. Menurut Sondakh (2010), secara umum sektor pariwisata (ekowisata ada didalamnya) dapat dimasukkan ke dalam kategori kelompok industri terbesar dunia karena sekitar 8% ekspor barang dan jasa di Indonesia umumnya berasal dari sektor ini. Di level global, pariwisata sudah jadi sumber utama devisa pada 38% negara penyumbang terbesar, sumber pendapatan dari sector jasa di perdagangan internasional yaitu \pm 37%, bahkan masuk ke dalam 5 besar pada kategori ekspor 83% negara WTO. Khusus untuk di Asia Tenggara pariwisata mampu menyumbang sekitar 7-8% dari total lapangan kerja dan 10-12% dari GDP. Dengan demikian, tujuan penelitian adalah menganalisis modal sosial masyarakat dalam mendukung pengembangan

ekowisata di hutan lindung melalui identifikasi dan mengukur unsur modal sosialnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan selama 2 bulan yaitu April – Mei 2018 di Desa Sukapura, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat (Gambar 1). Peralatan yang dipakai berupa alat tulis, perekam, panduan wawancara semi terstruktur, dan kamera. Obyek kajian adalah masyarakat Desa Sukapura Kecamatan Sumberjaya yang tinggal di sekitar hutan wisata Pinus Ecopark.



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian Pinus Ecopark di Desa Sukapura

Pengumpulan data primer melalui observasi ke lapang dan wawancara mendalam (*indepth interview*) dan memakai panduan kuesioner yaitu daftar pertanyaan semi terstruktur. Data primer yang dicari terdiri atas unsur-unsur modal sosial (kepercayaan, partisipasi dalam suatu jaringan, norma sosial, tindakan yang pro aktif, serta kepedulian terhadap sesama dan lingkungan). Data sekunder yang

dikumpulkan dengan cara studi pustaka adalah data tentang kondisi umum lokasi juga kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Responden penelitian dipilih secara sensus yaitu seluruh pengurus sejumlah 30 orang. Mereka adalah pengurus pengelola ekowisata Pinus Ecopark yang berasal dari Masyarakat Pekon Sukapura, Kelompok Pecinta Alam (KPA) Green, Himpunan Pemuda Peduli Hutan dan Lingkungan

(HPPHL) dan Kelompok Hutan Kemasyarakatan (HKm) Srimulya II yang membentuk konsorsium yang bernama West Land.

Modal sosial yang dimiliki komunitas masyarakat akan dikategorikan sesuai dengan Uphoff (2000) dan Wulandari dan Budiono (2017) yang kemudian dimodifikasi jadi 3 (tiga) kategori tingkat modal sosial. Berdasarkan skor yang sudah dirangkum dan dianalisis dari hasil isian responden ke semua pertanyaan pada kuesioner maka diperoleh nilai terendah adalah 73 dan tertinggi adalah 217. Pertanyaan-pertanyaan di kuesioner mencakup tentang 5 (lima) variabel modal sosial, yaitu kepercayaan, jaringan sosial, norma sosial, tindakan proaktif dan kepedulian. Setiap variabel terdapat 5 (lima) pertanyaan. Jawaban pada setiap pertanyaan memiliki skor 1 sampai dengan 4, yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju dan sangat setuju. Pembagian kategori skor disesuaikan dengan kebutuhan penelitian ialah modal sosial tinggi, sedang, dan rendah, dengan selang nilai rata-rata sebagai berikut:

$$\text{Selang Nilai} = \frac{X_{max} - X_{min}}{N} = \frac{217 - 73}{3} = 48$$

Dimana:

- X max : Nilai maksimum adalah hasil penjumlahan nilai max unsur modal sosial (217)
- X min : Nilai minimum adalah hasil penjumlahan nilai minimum unsur modal sosial (73)
- N : Jumlah kategori tingkatan berupa 3 tingkatan yaitu rendah, sedang, dan tinggi

Berdasarkan rumus diatas maka skala penilaiannya sebagai berikut:

- a. Modal sosial masyarakat dalam mendukung kegiatan ekowisata tinggi, jika jumlah skor berkisar 170 - 217
- b. Modal sosial masyarakat dalam mendukung kegiatan ekowisata sedang, jika jumlah skor berkisar 122 - 169
- c. Modal sosial dalam kegiatan ekowisata rendah, jika jumlah skor berkisar 73 - 121.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepercayaan.

Kepercayaan adalah salah satu unsur modal social yang penting dalam merekatkan hubungan antar anggota dalam kelompok maupun antar kelompok (Fukuyama, 2007). Meskipun penting namun sulit untuk dapat diukur karena bersifat subyektif (Grootaert, 2004) yang dipengaruhi perasaan dan kondisi manusia saat itu (Sidu, 2006). Tingkat kepercayaan anggota pengurus Pinus Ecopark adalah 142 yang artinya sedang. Tingkat kepercayaan pada tingkat ini kemungkinan karena kepengurusan yang ditunjuk belum harmonis dalam menjalankan kewajibannya sehingga antar anggota pengurus belum mempunyai rasa saling percaya (Putnam, 1993; Wulandari dan Budiono, 2017). Kepengurusan belum harmonis misalnya dalam memutuskan sesuatu hal untuk mendukung pengembangan Pinus Ecopark belum ada satu suara misal ketika memutuskan tentang jenis kebijakan ataupun program yang akan diaplikasikan dalam pengembangan arena ekowisata ini.

Jaringan Sosial.

Diketahui bahwa jaringan sosial bersifat multidimensi sehingga memungkinkan adanya *collective action*. Hal ini sangat terkait dengan tingkatan modal sosial dalam mendukung pengembangan ekowisata (Sidu, 2006). Lebih lanjut Sidu (2006) mendefinisikan jaringan sosial sebagai suatu hubungan yang tersusun dalam suatu interaksi dengan melibatkan orang, kelompok, masyarakat, juga informasi dan beragam pelayanan sosial yang ada didalamnya. Berdasarkan skor yang didapat diketahui bahwa kekuatan jaringan sosialnya tinggi (yaitu 187). Skor tinggi pada variabel modal sosial ini sangat mungkin karena banyak pihak yang telah memberikan dukungan dalam pengembangan ekowisata Pinus Ecopark misal Kelompok *Corporate Social Responsibility* (CSR) Provinsi Lampung, Tim Percepatan Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (TP4K) Provinsi Lampung, Dinas Kehutanan maupun donor lainnya.

Norma Sosial.

Pada umumnya hasil norma sosial akan berkorelasi dengan tingkat kepercayaan antar anggota pengurus. Tingkat kepercayaan berpengaruh terhadap kepatuhan anggota pada suatu entitas sosial tertentu (Hasbullah, 2006). Berdasarkan nilai rata-rata diketahui bahwa skor norma sosial adalah 151 dan masuk kategori sedang. Pada awal analisis diketahui bahwa tingkat kepercayaan antar anggota pengurus adalah sedang dan kemudian diperoleh skor norma sosialnya juga berkategori sedang. Dengan demikian para pengurus ekowisata di lokasi ini perlu mengupayakan peningkatan kepercayaan antar anggota pengurusnya. Prusak (2001) mengatakan adanya saling percaya dan pengertian yang tinggi, akan menimbulkan adanya kesamaan nilai dan perilaku yang mengikat anggota dalam sebuah jaringan kerja sehingga memungkinkan adanya kerja sama yang merupakan hal penting dalam pengembangan ekowisata.

Tindakan Proaktif.

Hasbullah (2006) menyatakan bahwa tindakan proaktif merupakan salah satu unsur penting dalam modal sosial. Adanya tindakan proaktif bukan saja berarti anggota berpartisipasi secara aktif tetapi juga mencari jalan keterlibatan mereka dalam suatu kegiatan sosial. Diperoleh tingkatan tindakan proaktif para anggota pengurus adalah 159 (sedang). Tingkat tindakan proaktif sebenarnya dapat dipakai untuk dasar pertimbangan mekanisme maupun intensitas pembinaan dan pendampingan

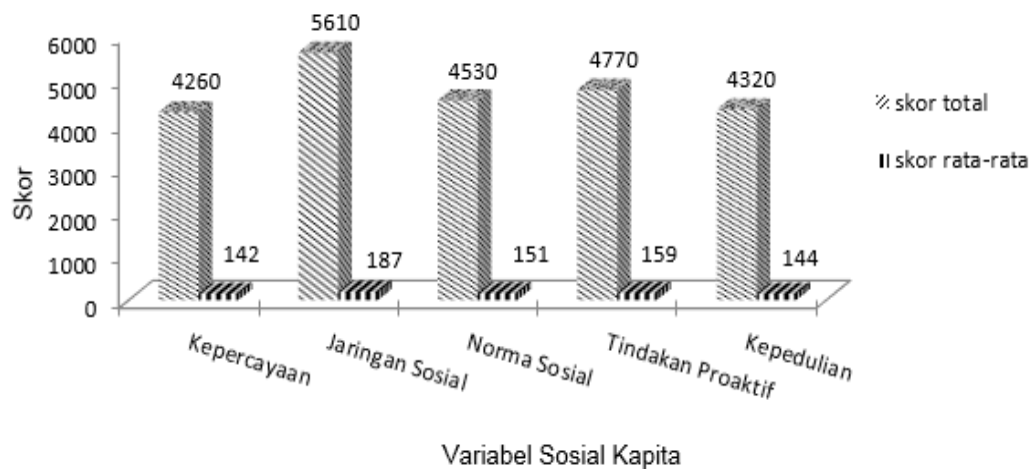
yang diberikan oleh pemerintah ataupun pihak luar pada suatu program masyarakat. Menurut Kapucu (2011), tingkat norma sosial dan kepercayaan antar anggota akan berpengaruh terhadap tindakan proaktif suatu kelompok.

Kepedulian.

Tingkat kepedulian anggota pengurus akan tinggi jika mereka mempunyai modal social yang baik (Hasbullah, 2006). Menurut Rinawati (2012), kepedulian merupakan pola pertukaran yang tidak dilaksanakan secara *reciprocal* seketika, tetapi merupakan suatu kombinasi jangka panjang dan pendek untuk membantu dan mengutamakan kepentingan orang lain (altruism). Diketahui bahwa tingkat kepedulian para anggota pengurus adalah tinggi (skor 144) sehingga sebenarnya bukan hal sulit bagi pengurus untuk meningkatkan norma, kepercayaan dan tingkatan proaktif karena kepedulian antar mereka sudah tinggi.

Modal sosial.

Berdasarkan skor dari seluruh unsur-unsur modal social yang dianalisis dalam penelitian ini maka diperoleh skor modal sosial seperti pada Gambar 2. Dikatakan modal sosialnya tinggi, artinya anggota masyarakat di sekitar Pinus Ecopark sangat mudah untuk dikembangkan dalam mendukung ekowisata, jika modal sosialnya sedang berarti mudah untuk dikembangkan, kebalikannya jika tingkat modal sosialnya rendah maka sulit untuk dikembangkan.



Gambar 2. Skor Sosial Kapital Pengurus Ekowisata Pinus Ecopark Sumber: data penelitian primer, 2018

Berdasarkan hasil analisis secara keseluruhan maka diketahui bahwa modal sosial para pengurus Pinus Ecopark adalah sedang karena rata-rata dari skor semua variabel modal sosial adalah sebesar 156,6. Tipe interelasi sosial yang ada didalam kepengurusan diketahui bahwa 15% responden cenderung bertipe modal sosial mengikat dan 85% lainnya cenderung menjembatani.

Responden yang bersifat mengikat maka sikapnya akan cenderung hati-hati ketika ada komunitas lain mau masuk atau mau bekerjasama atau memberikan masukan ke kelompok kepengurusan. Sebaliknya, untuk responden yang bersifat *bridging* (menjembatani) akan lebih akomodatif dengan inisiatif membangun yang diberikan pihak lain. Meskipun modal sosialnya sedang namun dengan banyak pengurus yang bersifat *bridging* maka sesungguhnya kepengurusan ini mempunyai potensi *collective action* yang tinggi sehingga berdampak positif terhadap Pinus Ecopark. Kondisi yang sama juga ditemui oleh Rinawati (2012) di Sukabumi yaitu pada kelompok masyarakat pengelola hutan rakyat dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Latabelakang pembentukan kelompok akan berpengaruh terhadap perbedaan tipe dan tingkatan interelasi diantara anggota pengurus maupun masyarakatnya (Wulandari dan Budiono, 2015). Pengelola Pinus Ecopark terbentuk karena adanya keinginan dari anggota masyarakat sehingga sifat *bridging* lebih mendominasi dan jaringan sosialnya tinggi.

SIMPULAN

Empat variabel modal sosial para pengurus Pinus Ecopark berkategori sedang dan satu variable yaitu jaringan sosial memiliki kategori tinggi. Diperoleh skor rata-rata modal sosial sebesar 156,6 (sedang) artinya modal sosial kepengurusan ini mudah untuk ditingkatkan. Diketahui bahwa mayoritas pengurus (85%) memiliki sifat *bridging* sehingga hal ini dapat membantu kepengurusan Pinus Ecopark meningkatkan tingkatan modal sosialnya. Adanya modal sosial yang baik akan menjadikan pengurus lebih saling percaya dan memiliki norma sosial yang juga baik sehingga lebih mudah dalam memecahkan suatu masalah dan juga lebih mudah

dalam mewujudkan kepentingan bersama dalam mengembangkan ekowisata Pinus Ecopark.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. 2018. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang di Provinsi Lampung. Bandarlampung.
- Fukuyama, F. 2007. *Trust: The Social Virtues and The Creation of Prosperity*. London: Hamish Hamilton.
- Goeldner C.R, Ritchie B, & McIntosh R.W. 2000. *Tourism: Principle, Practice, Philosophies*. Ed ke 8. John Wiley & Sons, Inc. Canada.
- Grootaert, C. 2004. *Measuring Social Capital: An Integrated Questionnaire*. Washington D.C.: The World Bank.
- Hasbullah, J. 2006. *Social Capital (Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia) Cetakan Pertama*. Jakarta: MR-United Press.
- Kapucu, N. 2011. Social Capital and Civic Engagement. *International Journal of Social Inquiry*, 4(1): 23-43.
- Kasih Y. 2007. *Peranan Modal Sosial (social capital) terhadap efektivitas lembaga keuangan di pedesaan (studi kasus di Provinsi, Sumatera Barat)*. (<http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/12106118125pdf>). Diakses pada tanggal 19 Mei 2018)
- Milic J.V, Jovanovic S, & Krstic B. 2008. *Sustainability Performance Management System of Tourism Enterprises*. Facta Universitatis. Series: Economis and Organization, Vol. 5, No. 2: 123 – 131.
- Poli W.I.M. 2007. *Modal Sosial Pembangunan: gambaran dan dua distrik di Kabupaten Jayapura*. Makasar: Hasanuddin University Press. 215 hal.
- Prusak, L. 2001. *In Good Company: How Social Capital Makes Organization Works*. Harvard: Harvard Business School Press.
- Putnam, R.D. 1993. The Prosperous Community: Social Capital and Public Life. *The American Prospect*. 13: 35-42.

- Rachmawati E. 2010. Sistem Sosial Pengembangan Wisata Alam di Kawasan Gunung Salak Endah. *Tesis*. Sekolah Pascasarjana, IPB. Bogor.
- Rahmayulis R. 2008. Modal Sosial dalam Pengembangan Ekowisata pada Masyarakat Adat di Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK), Kalimantan Barat. *Skripsi*. Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan, IPB. Bogor.
- Rinawati, R. 2012. Social Capital of the Community in the Development Private Forest at the Sub Watershed of Upstream Cisadane. *Tesis* tidak diterbitkan. Bogor: IPB.
- Sidu, D. 2006. Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan Lindung Jompi Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara. *Disertasi* tidak diterbitkan. Bogor: IPB.
- Sondakh, A. 2010. *Jendela Pariwisata: Perkembangan Pariwisata: Perkembangan Pariwisata Indonesia*. Jakarta: Kesaint Blance Publishing.
- Syahriar, G.H. & Darwanto. 2015. Modal Sosial dalam Pengembangan Ekonomi Pariwisata (Kasus Daerah Obyek Wisata Colo Kabupaten Kudus). *Jurnal Ekonomi Regional*, 10: 126–138.
- UNEP atau United Nations Environment Programme dan [WTO] World Tourism Organization. 2002. *Quebec Declaration on Ecotourism*. Quebec City, Canada: World Ecotourism Summit.
- Uphoff, N.2000. Understanding Social Capital: Learning from the Analysis and Experiences of Participation. In Dasgupta P and Serageldin I (Eds.). *Social Capital: A Multifaceted Perspective*. Washington D.C.: The World Bank.
- Winarni, I. 2011. *Keterkaitan Antara Modal Sosial dengan Produktivitas pada Sentra Bawang Merah di Kecamatan Pangelangan Kabupaten Bandung*. *Tesis* tidak diterbitkan. Jakarta: Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia Salemba.
- Wulandari, C. & Budiono, P. 2015. *Social Capital Status on HKM Development in Lampung*. International Conference of Indonesia Forestry Researchers. Bogor, 21-22 Oktober 2015.
- Wulandari, C & Budiono, P. 2017. Pentingnya Modal Sosial Masyarakat Sekitar Hutan dalam Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat. Seminar Nasional Komhindo III di Palangkaraya pada tanggal 3 Novemver 2017.
- Yustika, A.E. 2010. *Ekonomi Kelembagaan, Definisi, Teori, dan Strategi*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Zhao, W., Ritchie, J.R.B.& Echter, C.M. 2011. Social Capital and Tourism Entrepreneurship. *Annals of Tourism Research*. 38(4): 1570-1593